

Wednesday, 16 March 2016

Diduga Pekerjaan Talud Porto Amburadul

OKP Minta Kontraktor Bertanggungjawab

Ambon - Direktur Mollucas Economy Reform Institute, Tammat R. Talaohu meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit, terhadap proyek pembangunan talud pengamanan pantai Negeri Porto, Kecamatan Saparua Malteng yang dinilai bermasalah.

Menurutnya, kontraktor pekerja proyek CV. Conny pimpinan Hanok Leuwol harus bertanggungjawab atas ketidakberesan proyek yang dibiayai APBN 2015 senilai Rp. 1.370.000.000,-.

“Kontraktor ini jangan bekerja seenaknya. Sekarang ini sistemnya sudah terbuka dan masyarakat serta instansi vertikal yang ada bisa langsung melakukan pengawasan. Bila ini dikerjakan tidak sesuai bastek, maka harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya kepada *Siwalima* melalui telepon selularnya, Selasa (15/3).

Dikatakan, bila sudah ada laporan masyarakat mengenai amburadulnya permasalahan proyek tersebut, maka BPK harus segera meninjau dan bila perlu melakukan audit terhadap proyek ini, karena dananya berasal dari uang negara.

Ia sangat menyesalkan, bila memang amburadulnya proyek pembangunan talud pengamanan pantai Negeri Porto benar seperti yang terjadi, karena seharusnya proyek ini berguna bagi masyarakat setempat dan bukan malah menimbulkan masalah.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Maluku, Fredek Rahakbauw menyebutkan, permasalahan talud ini sebenarnya sudah pernah mengemuka beberapa waktu lalu, namun tidaklah seperti apa yang diduga masyarakat.

“Silahkan konfirmasi ke pihak Dinas PU Provinsi, karena sebenarnya ini bukan APBN namun APBD provinsi. Dan memang tidak ada masalah disana dan sudah dikerjakan sesuai bastek,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, proyek pembangunan talud pengaman pantai Negeri Porto, Kecamatan Saparua Kabupaten Malteng amburadul. Proyek yang dikerjakan CV. Conny pimpinan Hanok Leuwol itu, dibiayai APBN 2015 senilai Rp 1.370.000.000,-.

Warga Porto dalam rilisnya kepada *Siwalima*, Senin (14/5), mengungkapkan, pekerjaan pembangunan talud itu tidak sesuai bestek. Misalnya, kedalaman kofor yang harusnya 1 meter, tetapi hanya digali sekitar 40 cm. “Realisasi di lapangan, pekerjaan galian kofor 40 cm dan timbunan yang ada tidak sesuai,” jelasnya.

Menurutnya, dana sebesar itu harus dibangun talud 123 meter. Tetapi faktanya hanya sekitar 110 meter dengan ketinggian hanya 2,80 meter.

“Timbunan tanah juga hanya 80 ret atau 240 meter kubik dan saluran air panjang 10 meter dengan lebar 150 meter. Dengan nilai proyek milyaran rupiah itu, timbunan tanah seharusnya mencapai 1.200 meter kubik lebih. Sayangnya hal itu tidak dilakukan oleh kontraktor,” ujarnya.

Dikatakan, pekerjaan pembangunan talud ini sudah ditinjau oleh Dinas PU Provinsi Maluku Bidang PSDA, tetapi hingga kini tidak ada tindakan kepada kontraktor untuk menyelesaikan mengenai volume pekerjaan.

“Tanah timbunan yang begitu banyak dan sisa volume pasangan batu yang dari galian kofor talud dari 1 meter yang dipasang hanya 40 cm. Berarti masih tersisa 110 meter kubik dan tanah timbunan yang masih kurang 1.000 meter kubik. Dengan demikian, maka negara diduga rugi sebesar Rp 500 juta lebih,” urainya.

Ia menyayangkan pembangunan talud tersebut, sebab hasil pekerjaan akan mubasir. Saat air laut masuk dan menyeret tanah timbunan maka talud tersebut akan runtuh. “Kami takutkan jangan sampai dikemudian hari timbunan baru akan muncul atau proyek baru muncul di tempat yang sama untuk menutupi KKN dengan mata anggaran tersendiri, sehingga anggaran yang sudah dikeluarkan pada APBN 2015 untuk pekerjaan tersebut dianggap mubasir,” ujarnya.

Dijelaskan, pada saat pelaksanaan pekerjaan, warga mengusulkan kepada pimpinan CV Conny untuk membuat jalan guna memberikan akses bagi masyarakat ke talud tersebut. Namun usulan warga diabaikan.

Kadis Janji Tegur

Sementara itu, Kadis PU Maluku, Ismael Usemahu berjanji akan menegur CV Conny yang bekerja tanpa memasang papan nama proyek.

“Ini kesalahan kontraktor yang selalu dibilang tetapi melawan. Bukan hanya perusahaan tersebut, beberapa kontraktor lainnya juga pernah ditegur karena tidak menggunakan papan nama proyek,” kata Usemahu saat dikonfirmasi *Siwalima* di kantor gubernur, Senin (18/1) lalu.

Usemahu menegaskan, setiap proyek yang dikerjakan harus memiliki papan nama dan sudah diatur dalam aturan. Hanya saja, masih ada kontraktor bandel yang tidak menjalankan tugas dengan baik.

Soal pekerjaan yang dilakukan tak sesuai bestek, Usemahu mengatakan, setiap pekerjaan akan diaudit oleh BPK, sehingga ketahuan pekerjaan tersebut sesuai kontrak ataukah tidak.

“Kan nantinya diaudit oleh BPK, jadi tidak boleh kerja racik kuah sendiri, karena ketika diaudit ditemui tidak sesuai dengan perencanaan, maka harus dikerjakan ulang,” tandasnya.

Walaupun begitu, Usemahu berjanji akan mengecek kembali proyek tersebut, apalagi hal diadakan oleh masyarakat.”Saya akan cek kembali, apalagi kalau ini pengaduan masyarakat. Tetapi setahu saya, tidak mungkin kontraktor berani untuk melakukan itu, karena semua kerja sekarang ini diawasi, jadi tidak bisa asal-asalan,” ujarnya. (S-42/S-43)